

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS KOTA SEMARANG TAHUN 2009-2013)**

Sundari

Rr. Suprantinegrum

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : hmenteri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang Periode 2009 -2013. Metode Penelitian ini menggunakan Deskriptif Komperatif analisis untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Semarang, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio Keserasian Belanja Daerah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: hasil analisis rasio derajat desentralisasi dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 25,87% yang berada interval 25% -50% atau mempunyai kemampuan yang sudah baik dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan rasio KKD dengan rata-rata rasio KKD sebesar 37,79% berada pada interval 25% -50% berarti konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Rata-rata Rasio Efektivitas PAD $\geq 100\%$, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif itu menunjukkan dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut uraian dan perhitungan Rasio Keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kota Semarang diprioritaskan untuk belanja pembangunan sehingga belanja rutin masih relatif kecil.

Kata Kunci: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah

Abstract

This study aimed to analyze the effect the financial ability of Semarang City in order to support the implementation of regional autonomy, base on Semarang Budget Realization Reported the period of 2009 -2013. A descriptive comparative analysis used to measure the performance of regional financial management and the independence level of Semarang, consist of Regional Financial Independence Ratio, Degree of Decentralization Ratio, PAD effectiveness Ratio, and the Harmony Expenditure Ratio. Based on the analysis that has been obtained, the following results: from the analysis of the ratio of the degree of decentralization can be explained that the average ratio of the degree of decentralization is 25,87% of which is in the internal level of level 25%-50%, means already have a good ability to finance region development. Average KKD ratio is 37.79% which is in the interval 25 % -50 % means that central government intervention has begun to decrease, because the region is considered a little more able to implement region autonomy. From the analysis of PAD effectiveness is more than 100%, it can be concluded that the overall performance of local financial management and the degree of independence of Semarang area continued to improve. It can

be seen from some of the financial performance ratio is the ratio of the area of financial independence, the ratio of degrees desentralization, effectiveness ratio and the ratio continues to increase harmony and good effect on the autonomy of the region .

Keywords: *Region financial management performance, Degree of region decentralization*

LATAR BELAKANG

Pendahuluan

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah (Bahtiar Arif, 2006). Pemerintah melalui kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal), dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, telah membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat daerah. Kebijakan yang sudah berjalan diharapkan dapat menghidupkan proses reformasi pada tingkat lokal dan memberikan ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 2004 itu adalah, disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban – beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami dan merespon sebagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro internasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan (Bahtiar Arif, 2006).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai

apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Widodo. 2001). Hasil analisa rasio ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi realisasi pendapatan daerah.
3. Mengukur aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi dari masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisa keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan bersifat komersial, sedang pada lembaga publik khususnya pemerintah masih sangat terbatas, hal itu karena:

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan kepada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan incremental budget yaitu besarnya masing–masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah

presentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara incremental maka sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD.

3. Penilaian keberhasilan APBD dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan kepada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD-nya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, sangatlah relevan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah kota Semarang. Dimensi keuangan otonom yang paling penting yang akan diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan rasio keuangan diantaranya yaitu Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat, Belanja Daerah, dan Dana Perimbangan, dan Keserasian (Widodo. 2001).

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio derajat desentralisasi di Kota Semarang tahun 2009-2013?
2. Bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) di Kota Semarang tahun 2009 – 2013?
3. Bagaimana rasio Keserasian Belanja Daerah di Kota Semarang tahun 2009-2013?
4. Bagaimana rasio efektivitas dan pendapatan asli daerah di Kota Semarang tahun 2009-2013?

Kerangka Pemikiran Teoritis

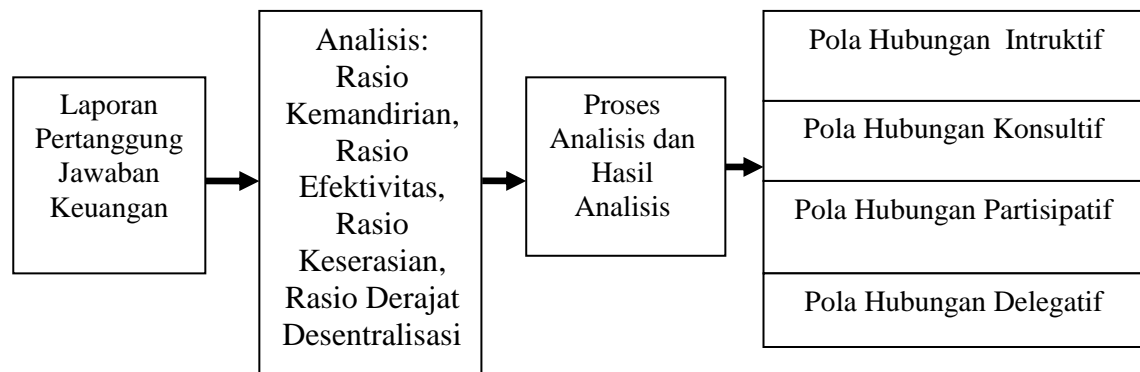
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah memberikan

informasi keuangan yang akurat berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah diperlukan analisis terhadap rasio keuangan daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Keserasian (Hakkim, Syamsudin, 2007). Setelah dilakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut, maka dapat ditentukan arah kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah. Alur kerangka pemikiran dapat dijelaskan pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Operasional Variabel

1. Derajat desentralisasi menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
3. Rasio Efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Rasio Keserasian Belanja Daerah ini menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.



Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah laporan Keuangan Daerah Kota Semarang dan sampel dari penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang tahun 2009 – 2013, dipergunakan untuk menghitung Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, dan Rasio Keserasian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut (Nazir .2003):

1. Metode Dokumentasi

Pencatatan, pengumpulan dan pengelompokan data berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber data sekunder.

a. Observasi

Mengadakan tinjauan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mengamati, meneliti dan mempelajari tentang data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Semarang tahun 2009-2013.

2. Metode Analisis

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis

rasio keuangan daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Semarang di dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar bagi operasionalisasi variabel yang di ukur sebagaimana akan dikemukakan dalam penelitian ini.
- c. Menghitung dan menyajikan hasil analisis data yang berupa rasio-rasio keuangan daerah.
- d. Menarik kesimpulan atas analisis data dan informasi yang disajikan, sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Semarang dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio ini yang diimplementasikan adalah Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Rasio Keserasian Belanja Daerah (Halim, 2007).

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap Total Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Keuangan

1. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Halim, 2007).

Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah adalah seperti Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah

Kemampuan Desentralisasi	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Baik	>50
Baik	25 – 50
Kurang Baik	10 – 25
Tidak Baik	<10

Sumber : (Halim, 2007)

Perhitungan rasio derajat desentralisasi Kota Semarang selama tahun 2009–2013 tersebut dimasukkan dalam Tabel 2.

Hasil analisis rasio derajat desentralisasi Kota Semarang pada tahun 2009 dikategorikan kurang baik dalam melaksanakan desentralisasi, karena hanya sebesar 19,89%, begitu juga tahun 2010 dan 2011 rasio desentralisasi fiskal hanya sebesar 20,20% dan 20,95%, keduanya masih dalam kategori kurang baik, hal ini dikarenakan kontribusi PAD yang rendah diikuti penerimaan daerah yang tinggi. Untuk tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 30,77% dan 33,10% berarti rasio derajat desentralisasi sudah baik, pemerintahan Kota Semarang sudah cukup mampu dalam menjalankan desentralisasi dan ketergantungan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat mulai berkurang.

Tabel 2. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Semarang Tahun 2009 – 2013

Tahun	PAD		Total Pendapatan Daerah		Rasio Derajat Desentralisasi (%)
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	
2009	306,112,422,821	-	1,538,490,537,516	-	19,89
2010	327,992,258,750	6,67	1,623,567,254,798	5,24	20,20
2011	521,538,058,477	37,11	2,053,919,562,042	20,95	25,39
2012	779,616,535,593	33,10	2,533,676,148,799	18,93	30,77
2013	925,919,310,506	15,80	2,796,570,726,860	9,40	33,10
Jumlah	2,861,178,586,147	92,80	10,546,224,230,015	54,52	129,35
Rata – Rata	572,235,717,229.40	23,2	2,109,244,846,003	13,63	25,87

Sumber : Data Primer yang diolah

Hasil analisis rasio derajat desentralisasi dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun mempunyai rata – rata rasio derajat desentralisasi sebesar 25, 87% yang berada interval 25–50 atau mempunyai kemampuan yang sudah baik dalam membiayai pembangunan daerah. Antara tahun 2009-2013, peningkatan tertinggi diperoleh pada tahun 2013 yaitu sebesar 33,10% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 19,89 %.

2. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai diri sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misal bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2007).

Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah seperti Tabel 3.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Semarang selama tahun 2009–2013 tersebut dimasukkan dalam Tabel 4.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan pada Tabel 4 diketahui bahwa kemampuan pemerintah kota Semarang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2009 – 2012 dikategorikan Konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu pada tahun 2009 sebesar 25,05%, pada tahun 2010 sebesar 29,29%, pada tahun 2011 sebesar 36,11% dan pada tahun 2012 sebesar 46,74%. Kenaikan Rasio kemandirian keuangan pada tahun 2013 yaitu sebesar 51,78% yaitu dikategorikan partisipatif, peranan pemerintah pusat sedikit sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirianya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, hal ini disebabkan disebabkan karena PAD yang tinggi seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 -25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : (Halim, 2007)

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	PAD		Total Transfer		Rasio KKD (%)
	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)	
2009	306,112,422,821	-	1,221,630,253,695	-	25,05
2010	327,992,258,750	6,67	1,119,589,688,648	-9,11	29,29
2011	521,538,058,477	37,11	1,444,057,828,565	22,46	36,11
2012	779,616,535,593	33,10	1,667,822,677,206	13,41	46,74
2013	925,919,310,506	15,80	1,787,969,405,733	6,71	51,78
Jumlah	2,861,178,586,147	92,80	7,241,069,853,847	33,47	188,97
Rata-rata	572,235,717,229.40	23,2	2,413,689,951,282	8,36	37,79

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kota Semarang Tahun 2009 – 2013 pada Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa rasio KKD yang diperoleh selama 5 tahun dengan rata – rata rasio KKD sebesar 37,79%. Hasil Rasio KKD tertinggi diperoleh pada tahun 2013 dan terendah diperoleh pada tahun 2009.

3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

Kriteria Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah adalah seperti Tabel 5.

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang selama tahun 2009 – 2013 dapat dimasukkan dalam Tabel 6.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Dari Tabel 6 menunjukkan Rasio Efektifitas PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah selama tahun 2009 – 2013 cenderung meningkat, pada tahun 2009 sebesar 105,14 % ,pada tahun 2010 sebesar 104,23%, pada tahun 2011 sebesar 116,66%, pada tahun 2012 sebesar 116,72% dan pada tahun 2013 sebesar 118,88% semua dikategorikan sangat efektif karena realisasi PAD lebih tinggi daripada target PAD, kecuali tahun 2010

sebesar mengalami penurunan dikarenakan menurunnya realisasi pada beberapa pos – pos PAD seperti pajak daerah dan retribusi. Peningkatan setiap tahunnya dikarenakan semua pos – pos pendapatan asli daerah realisasinya di atas 100%.

Rata-rata Rasio Efektivitas PAD \geq 100%, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif, itu menunjukkan bahwa dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel 5. Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas PAD (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	90 – 100
Cukup Efektif	80 -90
Kurang Efektif	60 – 80
Tidak Efektif	≤ 60

Sumber : (Halim, 2007)

Tabel 6. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD		Target Penerimaan PAD		Rasio Efektivitas (%)
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	
2009	306,112,422,821	-	291,142,899,270	-	105,14
2010	327,992,258,750	6,67	314,653,496,600	7,47	104,23
2011	521,538,058,477	37,11	447,032,951,000	29,61	116,66
2012	779,616,535,593	33,10	667,883,642,000	33,06	116,72
2013	925,919,310,506	15,80	778,866,930,000	14,24	118,88
Jumlah	2,861,178,586,147	92,80	2,499,579,918,870	84,38	561,63
Rata-Rata	572,235,717,229.40	23,2	499,915,983,774	21,095	112,326

Sumber : Data Primer Yang Diolah

4. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil (Halim, 2007). Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena

sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Hasil perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Kota Semarang selama tahun 2009 – 2013 dapat dimasukkan dalam Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Rasio Keceragaman Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2009 – 2013

Tahun	Belanja Pem- Bangunan (Rp)	Pertum- buan (%)	Total Belanja Daerah (Rp)	Pertum- buan (%)	Rasio Belanja Pembangunan (%)
2009	1,288,608,684,328	-	1,505,502,296,136	-	85,59
2010	1,516,173,060,279	15,00	1,732,662,151,376	13,11	87,50
2011	1,701,481,014,976	12,40	2,036,582,638,750	14,92	83,54
2012	1,701,481,014,976	- 0,17	2,053,334,797,225	0,81	82,86
2013	1,882,479,197,175	9,61	2,473,490,609,437	16,98	76,10
Jumlah	6,388,741,956,758	36,84	9,801,572,492,924	45,19	415,59
Rata-rata	1,562,420,313,927	9,21	1,960,314,498,585	11,29	83,118

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Tabel 8. Rasio Keceragaman Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2009 – 2013

Tahun	Belanja Rutin (Rp)	Pertum- buan (%)	Total Belanja Daerah	Pertum- buan (%)	Rasio Belanja Rutin (%)
2009	216,893,611,808	-	1,505,502,296,136	-	14,40
2010	216,489,091,097	-0,18	1,732,662,151,376	13,11	12,49
2011	305,708,572,973	29,18	2,036,582,638,750	14,92	15,01
2012	351,853,782,249	13,11	2,053,334,797,225	0,81	17,13
2013	591,011,412,262	40,46	2,473,490,609,437	16,98	23,89
Jumlah	1,681,956,470,389	82,57	9,801,572,492,924	45,19	82,92
Rata- rata	336,391,294,078	20,64	1,960,314,498,585	11,29	16,584

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja Rutin maupun belanja Pembangunan terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Dari hasil Tabel 7 pada tahun 2009 Rasio belanja Pembangunan sebesar 85,59% mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan yaitu masing – masing menjadi 83,54%, 82,86% dan 76,10%.

Sedangkan untuk rasio belanja rutin seperti dilihat pada Tabel 8 bahwa rasio belanja rutin pada tahun 2009 sebesar 14,49% mengalami kenaikan menjadi 12,49% pada tahun 2010 dan untuk tahun-

tahun berikutnya mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2011 sampai 2013 masing-masing menjadi 15,01%, 17,89% dan 23,89%.

Dari Tabel 7 dan Tabel 8 bahwa untuk rasio belanja pembangunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan untuk belanja rutin mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kota Semarang diprioritaskan untuk belanja pembangunan sehingga belanja rutin masih relative kecil. namun walaupun belanja rutin relative kecil untuk tahun ke tahun mengalami kenaikan berarti pemerintah kota Semarang sudah mulai condong dengan perekonomian kerakyatan. Rasio belanja pembangunan yang besar hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar belanja daerah dialokasikan di belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi untuk tahun 2009-2011 masih kurang baik, dikarenakan PAD yang masih rendah dan pemerintah daerah Kota Semarang masih tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat, namun pada tahun 2012- 2013 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu pada interval baik, dikarenakan pada pos-pos PAD khususnya pajak daerah mengalami peningkatan. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun dari tahun 2009 - 2013 mempunyai kemampuan yang sudah baik dalam membiayai pembangunan daerah. Dalam hal ini kontribusi PAD cukup tinggi maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2009 – 2012 tergolong mempunyai hubungan Konsultatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi sedangkan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu tergolong hubungan Partisipasif yang artinya peran pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Hal ini mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin kecil, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sudah cukup tinggi. Tingginya

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama pendapatan asli daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

3. Rasio efektifitas PAD dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk rata-rata rasio selama 5 tahun dari tahun 2009 – 2013 yaitu Rasio Efektivitas PAD \geq 100%, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif itu menunjukkan dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Rasio Kecerahan : rasio belanja rutin dan belanja pembangunan dapat disimpulkan bahwa sebagian dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Semarang diprioritaskan untuk kebutuhan belanja pembangunan sehingga rasio belanja rutin relatif kecil, namun walaupun belanja rutin relatif kecil untuk tahun ke tahun mengalami kenaikan berarti pemerintah kota Semarang sudah mulai condong dengan perekonomian kerakyatan. Rasio belanja pembangunan yang besar menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah telah dialokasikan di belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan. Semakin besar belanja pembangunan, maka manfaatnya menjadi lebih besar dan akan menambah asset/ kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran belanja rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Wulandari,A. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November*.

- Arif, B. Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Hakim, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta:LIPI Press.
- Halim, A. .2007. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, H. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN.
- Kifliansyah. 2001. *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Nazir,M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nirzawan. 2001, Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- UU RI. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.